

ORGANISASI KEAGAMAAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL: Beberapa Prinsip dan Praktik Diplomasi Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia

Andi Purwono

Dosen Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Wahid Hasyim Semarang
Email: andhi_unwahas@yahoo.co.id

Abstract

The current international security threat is not solely within the context of high politics. Conflict of communal identity has frequently become one of the real threats. Within this context, the treatment of state actors has not been sufficient. Diplomatic participation of private groups such as religious ones is getting more obvious. This article is particularly aimed at elaborating diplomatic efforts by *Nahdhatul Ulama*, one of the most influential Islamic organizations in Indonesia, in its contributions to establish worldly peace in both principles and practices.

Key words: religious organization, international peace, diplomacy

A. Pendahuluan

Hubungan internasional paska perang dingin ditandai dengan berkembangnya aktor dan isu. Di ranah aktor, bermunculan aktor-aktor bukan negara (non state actors) yang melakukan berbagai praktek hubungan internasional baik yang mengarah pada kerjasama dan perdamaian maupun ke arah konflik dan pertikaian. Negara tidak lagi menjadi *dominant actor* meski tetap menjadi *primary actor*.¹

Di ranah isu, perhatian umat manusia tidak lagi terfokus pada *high politics* berupa persoalan keamanan nasional dan militer semata, tetapi isu-isu yang semula masuk kategori *low politics* justru semakin mengemuka. Dampaknya, gangguan terhadap keamanan dan ketertiban internasional pun bukan monopoli isu *national security* itu. Ancaman keamanan non-tradisional seperti isu lingkungan hidup, penyebaran penyakit, kejahatan transnasional dan lainnya, juga mengancam perdamaian global. *Conflicts of communal identity* yang biasanya berbasis agama, etnisitas, ras, klan, suku, atau identitas lainnya menjadi salah satu yang mengemuka.

¹ Conway Henderon, *International Relations: Conflict and Cooperation at the Turn of 21st Century* (Singapore: McGraw Hill, 1998) khususnya chapter 3 tentang aktor-aktor hubungan internasional.

Dalam dunia yang berubah seperti itu, amanat pembukaan UUD 1945 menuntun kita untuk terus berupaya memainkan peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Ancaman keamanan internasional yang berkaitan dengan isu agama juga tidak luput dari diplomasi kita. Fakta Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar menguatkan hal itu.

Salah satu organisasi keagamaan yang turut berperan penting dalam kehidupan sosial politik Indonesia adalah Nahdlatul Ulama (NU). Sejak awal pendiriannya NU telah berupaya melakukan partisipasi diplomasi di ranah hubungan internasional dengan pengiriman delegasi Komite Hijaz kepada pemerintah Saudi Arabia demi tujuan menjamin toleransi dalam praktek beragama. Bagaimana diplomasi yang dikembangkan NU dalam menangani berbagai problem yang mengancam keamanan internasional, baik dari sisi prinsip maupun prakteknya ?

B. Agama: Antara Kekuatan Konflik atau Damai

Agama sejak lama terpinggirkan dalam studi dan praktek hubungan internasional modern. Dalam perspektif sejarah diplomasi Eropa, perjanjian Westphalia 1648 dirujuk sebagai momentum awalnya. Sebaliknya, praktek *real politics* atau *power politics* atau *match politics* berbasis kepentingan lebih mendominasi. Ini bisa cermati misalnya dari fakta bahwa realisme (dan bukan idealisme) politik internasional yang menjadi perspektif dominan hubungan internasional. Meski demikian, sebenarnya sepanjang sejarah, agama membentuk identitas politik signifikan dan memainkan peran penting dalam politik global.²

Abad ke-21 ini juga menyadarkan kita untuk kembali memperhatikan persoalan agama dalam kajian hubungan internasional. Berakhirnya perang dingin, publikasi artikel *clash of civilization* (benturan peradaban) Huntington, hingga tragedi 11 September 2001 disebut-sebut banyak pihak sebagai faktor-faktor yang turut mendorongnya. Artinya, seiring perkembangan global, agama semakin diyakini perannya dalam hubungan internasional.³ Bahkan dewasa ini, agama dinilai sebagai sumber identitas yang semakin bersaing dengan kewarganegaraan dalam mendapat loyalitas masyarakat.

Agama adalah fenomena transnasional yang ibarat dua sisi mata uang berpotensi menciptakan harmoni dan konflik.⁴ *Ghirah* (sentimen) agama begitu

² Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Raffery, *Pengantar Politik Global* (Bandung:Nusamedia, 2012), h. 859.

³ seperti dalam artikel Monica Duffy Toft, *Religion Matters in International Relations* dalam http://www.huffingtonpost.com/monica-duffy-toft/turning-religious-and-mul_b_481237.html

⁴ Charles W. Kegley and Eugene R. Witkopf, *Global Politics: Trend and Transformation*. 6th Edition (New York: St martin Pressl, 1997). Untuk melihat kaitan agama, sebagai bagian dari identitas sosial yang mengancam keamanan bisa dibaca di Peter Hough, *Understanding Global Security*. 2nd

gampang beresonansi menjadi kekuatan yang menyebar ke segala penjuru bumi dengan besaran yang tak terkirakan. Pengaruh agama dalam hubungan internasional seperti tercantum dalam karya Jonathan Fox, *The Multiple Impacts of Religion on International Relations: Perceptions and Reality*⁵ meliputi empat hal yaitu *sources of legitimacy for states and its opponent, religious world view, local religious conflicts are international issues, transnational religious phenomena and issues*. Oleh karenanya pengaruh agama dalam politik internasional menjadi tak terelakkan.

Namun kalau kita memakai pemikiran perspektif instrumentalism dalam melihat peran agama dalam konflik sebagaimana terwakili pemikir seperti Dieter Senghaas misalnya, sebenarnya jarang sekali agama menjadi variabel asli penyebab konflik.⁶ Yang banyak terjadi justru fakta bahwa agama dieksploitasi untuk tujuan politis, ekonomi, dan sosial sehingga memicu konflik. Senada dengan ini adalah pandangan yang menyebut bahwa agama sering memainkan peran penting dalam perang, namun sebenarnya jarang sekali menjadi penyebabnya.⁷

Sementara itu Shireen T. Hunter dalam artikel *Religion and International Affairs: From Neglect to Over-Emphasis* menyebut bahwa agama mempengaruhi hubungan internasional dengan cara yang sama dengan sistem nilai dan ideologi yang lain yaitu dengan mempengaruhi perilaku negara dan aktor bukan negara. Dengan kata lain, agama berperan sama dengan ideologi- ideologi lain untuk melegitimasi keputusan kebijakan dan mengumpulkan dukungan populer bagi kebijakan itu.⁸ Sesuai sistem politiknya masing- masing, pengaruh agama bisa dilacak pada aktivitas kelompok agama, yang ditujukan untuk mempengaruhi perilaku negara dalam sistem demokratis, maupun pada kecenderungan para pemimpin politik kunci. Agama telah mempengaruhi perilaku aktor internasional tapi bukan menentukan.

Dalam hubungan agama dan keamanan internasional sebagaimana paparan di atas, maka perhatian terhadap berbagai kelompok keagamaan dan aktivitasnya menjadi penting. Banyak analisa dan bahkan kebijakan yang kemudian

Edition (London: Routledge, 2008). Di halaman 120 buku itu juga dipaparkan tipologi kekerasan agama kontemporer di dunia.

⁵ http://www.ifri.org/files/politique_etrangere/4_2006_Fox.pdf

⁶ Dr. Ines- Jacqueline Werkner dalam *the Caucasian Review on International Affairs* Vol. 4 Summer 2010: 273-247).

⁷ Al McKay, *Religion, Sacred Value and Conflict* artikel diposting June 14, 2012 di <http://www.e-ir.info/2012/06/14/religion-sacred-values-and-conflict/>. Al McKay is an Associate Editor at e-IR.

⁸ Shireen T. Hunter is a visiting Professor at the Edmund A. Walsh School of Foreign Service, Georgetown University. Her latest publications are: *Iran's Foreign Policy in the Post-Soviet Era: Resisting the New International Order*, Praeger, May 2010, *Reformist Voices of Islam: Mediating Islam and Modernity*, M. E. Sharpe, 2008. Artikel bisa dilihat di <http://www.e-ir.info/2010/04/07/religion-and-international-affairs-from-neglect-to-over-emphasis/> Diakses 14 Mei 2013 jam 16.36 WIB.

mendikotomikan antara kelompok radikal dan moderat. Sebagai bagian dari aktor bukan negara, berbagai *text book* hubungan internasional memberi porsi paparan yang sangat singkat terhadap kelompok agama karena karena biasanya hanya berupa *sub chapter* dari sebuah buku.⁹ Dua dekade terakhir baru kita melihat perhatian yang lebih besar, apalagi paska tragedi 9/11, berbagai kelompok teroris banyak sekali disebut.¹⁰

Dalam konteks seperti itu, sayangnya, jarang sekali kelompok-kelompok yang moderat justru disebut. Terlihat ada kecenderungan melihat agama dan kelompok agama semata dalam dimensi sumber konflik. Padahal sebagaimana diungkapkan Appleby “*the facts suggest a dual legacy of organized religion, a tremendous potential for violence as well as extraordinary resources for reconciliation*”.¹¹ Artinya, sebenarnya telah tumbuh pula kesadaran tentang banyaknya ruang positif yang dimainkan oleh agama dalam konteks harmoni dan perdamaian. Peran agama sebagai inspirasi perdamaian juga bisa dibaca misalnya dalam essay Nathan Huber.¹²

Contoh lain dari peran kelompok moderat ini misalnya ada di dalam buku *Religion in International Relations: The Return from Exile* yang diedit oleh Pavlos Hatzopoulos and Fabio Petito.¹³ Di buku itu tercantum artikel *Islam and the West: Muslim Voices of Dialogue* karya John L. Esposito and John O. Vol yang juga membahas peran Anwar Ibrahim dari Malaysia dan Abdurrahman Wahid dari Indonesia. Buku lain yang membahas kelompok moderat adalah *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations* yang diedit oleh Jan Melissen.¹⁴ Di dalam buku itu tercantum bab tentang *Dialogue-based Public Diplomacy: a New Foreign Policy Paradigm?* karya Shaun Riordan.

Dalam kaitan muslim Indonesia, setidaknya dua organisasi keagamaan besar sering diidentikkan dengan kelompok moderat yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Keberadaan mereka yang menjadi kelompok terbesar di Indonesia menyebabkan sikap dan perilaku politiknya termasuk dalam ranah internasional

⁹Misalnya karya Anak Agung Banyu Perwita dan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), atau karya Robert Jackson & Georg Sorenson, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

¹⁰ seperti dalam buku karya Colin S. Gray, *War, Peace and International Relations : An Introduction to Strategic History* (New York: Routledge, 2007).

¹¹ karya R. Scott Appleby dalam *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation*, (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2000).

¹²Nathan Huber 27 March 2009, *Religion and International Peacemaking*

<http://www.nathanhuber.com/essays/religion-and-international-peacemaking>.

¹³ Hatzopoulos, Pavlos and Fabio Petito, *Religion in International Relations: The Return from Exile* yang diedit oleh (New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2003)

¹⁴Melissen, Jan., *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations* (New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2005)

diperhatikan. Mereka sering kali melakukan diplomasi di jalur kedua (second-track diplomacy) untuk turut menangani beberapa problem keamanan internasional.

C. Diplomasi Kemanusiaan NU: Beberapa Prinsip yang Mendasarinya

Dua sumber hukum utama Islam yaitu al Qur'an dan Hadis secara jelas menstimulasi umat islam untuk terlibat dalam aksi kemanusiaan.¹⁵ Bahkan terkait bantuan kongkrit seperti zakat, infaq, dan sedekah, semuanya menjadi ritual sekaligus kewajiban. Hal ini yang turut membuat agama islam lekat dengan ide kemanusiaan.

Sebagai *jam'iyah diniyah al-ijtima'iyah* (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan), Nahdlatul Ulama (NU)¹⁶ didirikan atas motif dan asas serta cita-cita keagamaan yaitu *izzul Islam wal muslimin* (keluhuran Islam dan kaum muslimin) menuju *rahmaan lil 'alamin* (menjadi rahmat bagi seluruh alam).¹⁷ Implikasinya, segala sikap, tingkah laku dan karakteristik perjuangannya selalu disesuaikan serta diukur dengan norma hukum dan ajaran Islam. Adapun ajaran Islam yang diemban adalah ajaran *ahlus sunnah waljamaah* (sunni) dengan beberapa prinsip dasar seperti *tasamuh*, *tawazun*, *ta'adul (i'tidal)*, *tawasuth* dan *tasyawur* (musyawarah) sesuai dasar dari al Qur'an.¹⁸

Tawasuth (moderat) adalah sikap keberagamaan yang tidak terjebak terhadap hal-hal yang sifatnya ekstrim. Al Qur'an surat al-Baqarah ayat 143 yang dijadikan landasan menyatakan, "Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian (umat Islam) umat pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) manusia umumnya dan supaya Allah SWT menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) kamu sekalian." Pilihan atas sikap *tawasuth* ini didasari oleh kemampuan NU untuk menemukan nilai-nilai substantif dari Islam, dengan pengamalan ajaran Islam yang kontekstual dengan kebutuhan umat.

Tasamuh (toleransi) hakikatnya adalah sebuah sikap keberagamaan dan kemasyarakatan yang menerima kehidupan sebagai sesuatu yang beragam. Artinya menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. *Tawazun* (seimbang atau proporsional) adalah sebuah keseimbangan

¹⁵ Jamal Krattes, *The Influence of the Muslim Religion in Humanitarian Aid*. International Review of the Red Cross Volume 87 Number 858 June 2005

¹⁶ Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah* (Surabaya: Khalista, 2007)

¹⁷ KH Achmad Siddiq, KH. *Khitthah Nahdliyyah* (Surabaya: Khalista, 2007)

¹⁸ KH Ahmad Sidiq, *Ibid.*, atau bisa juga dibaca pada KH Muhyidin Abdusshomad dalam <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,16551-lang,id-c,syariah-t,Karakter+Tawassuth++Tawazun++I+tidal++dan+Tasamuh+dalam+Aswaja-.phpx>

sikap keberagaman dan kemasyarakatan yang bersedia memperhitungkan berbagai sudut pandang, dan kemudian mengambil posisi yang seimbang dan proporsional.¹⁹ Surat al Hadid ayat 25 berkata, "Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (penimbang keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan." Jika sudah melakukan *tasamuh* dan *tawazun*, maka manusia akan terdorong untuk melakukan *tasyawur* (musyawarah), yaitu melakukan dialog dalam setiap penyelesaian persoalan.

I'tidal adalah adil atau juga tegak lurus menyangkut kebenaran kognitif yang bisa dimaknai sebagai konsistensi menegakkan kebenaran agama dengan cara metodologi yang benar. Surat al Maidah ayat 9 berkata, "Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela (kebenaran) karena Allah menjadi saksi (pengukur kebenaran) yang adil. Dan janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah karena keadilan itu lebih mendekatkan pada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."²⁰

Apa makna prinsip-prinsip tersebut dalam konteks kemanusiaan? Beberapa prinsip tersebut menurut As'ad Said Ali hakikatnya merupakan nilai-nilai operasional yang mengejawantahkan misi besar Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.²¹ Lebih lanjut menurutnya dengan prinsip itu pergerakan Islam menjadi tidak terbatas sekedar pada kelompoknya sendiri. Sebaliknya, kesempurnaan Islam justru terlihat karena ia bisa merangkul segenap persoalan yang berada di luar batas kediriannya. Paradigma perjuangan Islam untuk bangsa, untuk masyarakat, dan untuk kemashlahatan semua ini lah modalitas terbesar yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan.

Implikasinya pada relasi sosial yang plural adalah bahwa sikap yang dikembangkan adalah toleransi kepada kelompok yang berbeda, serta memandang bahwa pergaulan antar golongan harus atas dasar saling menghormati dan menghargai. Perilaku sosial warga NU adalah menjunjung tinggi norma-norma Islam dengan mendahulukan kepentingan bersama, menjunjung tinggi persaudaraan, nilai kerja dan prestasi serta ilmu pengetahuan. Di ranah politik menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, bersikap konstitusional dan menegakkan hukum. Dalam bidang

¹⁹ KH Masyhudi Muchtar, *Aswaja An-Nahdliyah, Ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah yang Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Khalista, 2007), hal. 51-52.

²⁰ Lihat Terjemah al Quranul Karim.

²¹ As'ad Said Ali, *Islam Rahmatan Lil 'Alamin: NU dan Peran Kenegaraannya* (Pidato di Istanbul) bisa dilihat dalam <http://www.nu.or.id/a,public-m,dynamic-s,detail-ids,6-id,35031-lang,id-c,taushiyah-t,Islam+Rahmatan+Lil++Isquo+Alamin++NU+dan+Peran+Kenegaraannya-.phpx>

budaya bersikap proporsional- normatif dalam pengertian menyikapi budaya dengan ukuran nilai hukum dan ajaran agama serta tidak berhadap-hadapan/ apriori terhadap budaya.²²

Pemahaman kepada esensi atau substansi agama, serta penguasaan terhadap cakrawala pemikiran berbagai mazhab dalam Islam memberi NU keluasan cara pandang dan perilaku. Menurut Rois 'Aam KH Sahal Mahfudz, NU memiliki karakter elastisitas dan fleksibilitas.²³ Fiqih sebagai pengetahuan tentang hukum Islam mesti dilihat sebagai *ijtihad* (buah pikir dan interpretasi manusia terhadap teks).²⁴ Konstruksi ajaran agama melalui fiqih juga memungkinkannya untuk berubah jika teks- teks fiqih yang ada misalnya tidak relevan atau tidak bermuara kepada keadilan..

Pada ranah yang lebih luas termasuk dalam tata pergaulan internasional misalnya, prinsip- prinsip tersebut menjadi inspirasi bagi perwujudan Islam moderat dan perdamaian yang tentu sejalan dengan *humanitarian principles*. Cita- cita universal Islam sendiri dalam pandangan NU hakikatnya bisa disarikan dalam *maqhasidus syariah* yaitu *hifdzud din* (memelihara agama), *hifdzul aql* (memelihara kebebasan berfikir), *hifdzul mal* (memelihara harta benda), *hifdzun nafs* (memelihara hak hidup), dan *hifdzun nasb* (memelihara hak untuk mengembangkan keturunan).²⁵

Implikasinya, setiap muslim sejatinya dituntut memiliki kepekaan tinggi terhadap kemanusiaan. Salah satu sabda nabi yang sering dikutip dalam kaitan dengan nilai kemanusiaan ini adalah *unshur akhaka dzaliman au madzlukan* (tolonglah saudaramu baik ketika ia melakukan kezaliman atau ketika ia dizalimi). Ini juga menjadi landasan teologis yang tidak hanya dikhususkan pada muslim lain (sejalan dengan prinsip imparsialitas yaitu melakukan aksi kemanusiaan tanpa diskriminasi terhadap identitas apapun). Adapun ayat al Qur'an yang sering dikaitkan dengan hal ini adalah Surat al Hujurat 13 bahwa Tuhan menjadikan manusia dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan manusia berbangsa-bangsa bersuku- suku untuk saling mengenal. Karya- karya klasik kitab kuning dalam tradisi NU atau beberapa buku seperti *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam*

²² Thoyyib dan Endang Turmuzi (eds.), *Islam Ahlussunnah Waljamaah: Sejarah, Pemikiran dan Dinamika Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Pustaka Maarif NU, 2007), h. 199-200.

²³ Sahal Mahfudz "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek" yang merupakan pengantar dalam M. Imdadun Rahmat (ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail* (Jakarta:Lakpesdam, 2002)

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Ahmad Zubaidah, Citra Islam Rahmatan lil Alamin dalam Noor Shodiq Iskandar dan Hasan Abadi (eds.), *Konfigurasi Nalar Nahdlatul'Ulama* (Malang: Pustaka Iqtishod, 2010), h. 63-68.

Pesantren,²⁶ *Tasawuf sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi*,²⁷ setidaknya juga bisa menguatkan bahwa prinsip-prinsip yang sejalan dengan kemanusiaan itu lekat dalam tradisi NU.

Dalam pandangan Hasyim Muzadi, prinsip-prinsip itu juga menjadi karakter kemasyarakatan yang khas sekaligus modal NU dalam pergaulan dengan masyarakat luas.²⁸ Modalitas itu pada gilirannya sangat berperan dalam membangun *ukhuwwah islamiyah* (persaudaraan sesama muslim) maupun *ukhuwwah wathoniyah* (persaudaraan sesama anak bangsa) sehingga bisa bergandengan tangan menjaga kerukunan antar umat beragama, maupun *ukhuwwah insaniyah/basyariah* (persaudaraan sesama manusia). Pada titik ini jelas terlihat betapa nilai kemanusiaan (humanity) menempati posisi yang sangat sentral sebagai bagian tidak terpisahkan dari sikap keberagamaan seorang muslim. Pada tataran global, modalitas itu juga menjadikan NU duta bangsa dalam memperkenalkan ke berbagai belahan dunia tentang ajaran Islam *rahmatan lil 'alamin* ini.

Practices

Jika secara konseptual bergitu indah, lalu bagaimana implementasinya di tataran praktek? Dalam pengalaman NU, di level nasional kita melihat bahwa beberapa prinsip itu lah yang mendorong kehadiran sikap dan perilaku yang menghargai kemajemukan, antikekerasan, hingga penghargaan terhadap minoritas. Ini misalnya terlihat dalam keputusan spektakuler dalam Munas Alim Ulama NU (1983) dan Muktamar ke-27 NU di Situbondo. Ketika itu (1984), dengan "berani", NU menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas, mendahului organisasi masyarakat mana pun di Indonesia. Bahkan, KH Achmad Shiddiq sebagai *Rais Aam* Pengurus Besar Nahdlatul Ulama waktu itu menyatakan bahwa negara Pancasila adalah bentuk final dari upaya umat Islam mendirikan negara.²⁹ Pada berbagai tahap perkembangan bangsa, sikap NU juga konsisten mensinergikan agama dan nasionalisme, dan bukan mempertentangkannya. Dalam konteks pluralitas Indonesia, sikap ini sangat bermakna mengingat potensi pengikutnya yang sangat besar.

²⁶Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Bekerja sama dengan Fahmina Institute Cirebon, 2006)

²⁷Said Agil Siradj, *Tasawuf sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*. (Bandung: Mizan, 2006)

²⁸ Lihat KH Hasyim Muzadi, *Islam Rahmatan Lil'alamin Menuju Keadilan dan Perdamaian Dunia (Perspektif Nahdlatul Ulama)* dalam pidato ilmiah penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dalam 'Peradaban Islam dari IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 Desember 2006.

²⁹ Ayu Sutarto, *Menjadi NU, Menjadi Indonesia: Pemikiran KH Abdul Muchith Muzadi* (Surabaya: Khalista, 2007)

Pada level global, prinsip-prinsip itu juga menjadi penuntun peran aktif yang sejalan dengan nilai kemanusiaan. Nahdlatul Ulama (NU) tampil ke kancah global dengan mengampanyekan Islam *rahmatan lil alamin*. Makna dari rahmat bagi seluruh alam ini menurut bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk kaum non-Muslim atau orang yang tak beriman sekalipun.

Pada tahap awal pendirian NU, partisipasi diplomasi melalui pengiriman delegasi Komite Hijaz kepada pemerintah Saudi Arabia demi tujuan menjamin toleransi dalam praktek beragama. Langkah ini merupakan pelopor perjuangan kebebasan bermadzhab di Mekah, sehingga umat Islam sedunia bisa menjalankan ibadah sesuai dengan madzhab masing-masing.³⁰ Ini tentu sumbangsih yang tidak bisa disepelekan dalam konteks persatuan persaudaraan (ukhuwah islamiyah) dan perdamaian. Bisa dibayangkan jika yang terjadi sebaliknya, tentu konflik intra-muslim dalam konteks perbedaan pandangan keislaman bisa lebih keras dari saat ini.

Sayangnya, pada era orde lama dan orde baru, perhatian NU banyak terkuras pada politik praktis. Karya-karya seperti *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*,³¹ *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*,³² *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*,³³ *Anatomi Konflik: NU, Elite Islam dan Negara*,³⁴ *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*,³⁵ *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*,³⁶ *Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Interpretasi, NU vis a vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*,³⁷ *“Bodohnya NU” Apa “NU Dibodohi”?: Jejak Langkah NU Era Reformasi: Menguji Khittah Meneropong Paradigma Politik*,³⁸ *Menggagas Peran Politik NU*.³⁹ *Avonturisme NU: Menjajaki Akar Konflik-Kepentingan Politik Kaum Nahdhiyyin*,⁴⁰ *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran*

³⁰ Lihat nu online bagian dinamika <http://www.nu.or.id/a,public-m,static-s,detail-lang,id-ids,1-id,10-t,dinamika-.phpx> atau di bagian sejarah <http://www.nu.or.id/a,public-m,static-s,detail-lang,id-ids,1-id,6-t,sejarah-.phpx>

³¹ Martin Van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LkiS, 1994)

³² A. Gaffar Karim, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, 1995)

³³ M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya* (Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996)

³⁴ Laode Ida, *Anatomi Konflik: NU, Elite Islam dan Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996)

³⁵ Fealy, Greg, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LkiS, 1998)

³⁶ M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998)

³⁷ Feillard, Andree, *NU vis a vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna* (Yogyakarta: LkiS, 1999)

³⁸ Bahrul 'Ulum, *“Bodohnya NU” Apa “NU Dibodohi”?: Jejak Langkah NU Era Reformasi: Menguji Khittah Meneropong Paradigma Politik* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press Bekerja sama dengan PW IPNU Jawa Tengah, 2002)

³⁹ Salahuddin Wahid, *Menggagas Peran Politik NU* (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002)

⁴⁰ Ali Anwar, *Avonturisme NU: Menjajaki Akar Konflik-Kepentingan Politik Kaum Nahdhiyyin* (Bandung: Humaniora, 2004)

Politik,⁴¹ bisa menggambarkan hal itu. Bahkan muncul kritik dan kegeraman di kalangan muda terhadap kecenderungan “syahwat politik” yang kuat di kalangan beberapa pimpinan NU yang dikhawatirkan menggerus peran kemasyarakatan, kemanusiaan, dan kebangsaannya.

Di era reformasi, terlihat upaya NU bersama Departemen Luar Negeri RI dengan aktif menggelar rangkaian *interfaith dialogues* pada periode 2004-2006. Secara kelembagaan NU juga membentuk *International Conference of Islamic Scholars* (ICIS) atau Konferensi Ulama dan Cendekiawan Muslim Sedunia. Beberapa konferensi yang berhasil diselenggarakan antara lain, pertama pada 23-25 Februari 2004, yang kedua pada 20-23 Juni 2006, dan yang ketiga (29 Juli-1 Agustus 2008). ICIS bisa disebut sebagai upaya Globalisasi Islam *Rahmatan Lil’alamin*.⁴² Melalui lawatan- lawatan internasionalnya, kampanye ini juga disebar ke Syiria, Libanon, Iran, Palestina- Israel, Pakistan, Vatikan, Uni Eropa, Inggris, Jerman, Australia, Amerika, dan PBB.

Adapun strategi yang digunakan antara lain dengan menjelaskan tentang Islam *Rahmatan Lil’alamin* sehingga mengurangi kesalahpahaman dan islamophobia (Amerika), *shuttle diplomacy* secara bergiliran dan berturut-turut menemui dan mendorong para pihak bertikai untuk kembali ke jalur dialog dan negosiasi (Palestina- Israel), menemui para pihak bertikai dan mendorong dialog demi meredakan konflik sektarian Sunni- Syiah (Suriah, Libanon, Iran) dengan mengedepankan *ukhuwah islamiyah*,⁴³ menggalang dukungan antiserangan George W. Bush ke Irak (Vatikan, Uni Eropa), mendesak badan internasional untuk memfasilitasi dan memediasi dialog antarperadaban (PBB), mengirim tenaga-tenaga muda dari pesantren (ke Inggris) mengikuti pelatihan manajemen pendidikan dan studi lanjut sekaligus dalam rangka pengenalan budaya lain, menyampaikan simpati dan mengunjungi para keluarga korban Bom Bali I serta menjelaskan sikap NU yang antiterorisme (Australia) serta menggalang kerjasama dalam bidang pendidikan.

Selain itu ada apresiasi yang diterima dari upaya NU membantu pembebasan 12 warga Korsel oleh pejuang Taliban Afghanistan (29/8/2007). Kepercayaan dan apresiasi juga diperoleh dari upaya menjembatani konflik Pattani di Thailand. Pendekatan kepada parapihak termasuk pada ulama melalui beberapa pertemuan dan pembahasan pada akhirnya membuahkan hasil. Peran ormas-ormas besar

⁴¹Ridwan, *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2004)

⁴² Hasyim Muzadi, *Loc.Cit.*

⁴³ NU Berpotensi Mainkan Diplomasi Publik di di Timur Tengah dalam http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=1260&type=15

seperti NU dan Muhammadiyah yang mendukung upaya perdamaian itu lah yang dinilai menjadi faktor pendukung sukses diplomasi Indonesia.⁴⁴

Ulama NU diundang oleh Perdana Menteri Thaksin dan Raja Thailand untuk menjembatani perpecahan (*gap*) antara pemerintah Thailand dan Muslim Patani. Kehadiran NU dilakukan pertama pada Maret-April 2005 dan diterima oleh PM Thailand Thaksin Shinawatra, Raja Thailand Bhumibol Adulyadej dan pejabat tinggi lainnya. Kunjungan kedua dilakukan pada 11-12 September 2006. Misi NU waktu itu adalah memberi masukan pemerintah Thailand untuk menyelesaikan konflik di tiga provinsi di Thailand Selatan, yaitu Yala, Pattani, dan Narathiwat yang mayoritas penduduknya Muslim.

NU juga berpartisipasi menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Indonesia terkait beberapa problem hubungan internasional yang sedang terjadi. Dalam kasus Muslim Rohingya di Myanmar, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan keprihatinannya dan mendesak pemerintah menempuh jalur diplomasi untuk turut menyelesaikan permasalahan yang membelit hampir satu juta warga Rohingya itu.⁴⁵

Terakhir, terhadap berbagai kasus *blasphemy* (penghinaan agama), sikap NU juga bisa disebut unik/ khas. Ini didasari kesadaran bahwa ada perbedaan cara pandang antara dunia Islam dan sebagian masyarakat Barat dalam menyikapinya. Jika hampir semua muslim melihatnya sebagai penghinaan, maka sebagian masyarakat Barat justru melihatnya dalam konteks *freedom of expression* (kebebasan berekspresi).⁴⁶

Beberapa di antaranya yang memicu reaksi global adalah publikasi 12 kartun Nabi Muhammad yang diterbitkan di surat kabar Jylland- Posten Denmark pada 30 September 2005. Lalu ada film anti-Islam *Fitna* garapan anggota parlemen Belanda, Geert Wilders, pada Maret/ April 2008. Kejadian berikutnya adalah publikasi rencana pembakaran kitab suci umat Islam itu oleh sekte Evangelis Dove World Outreach Center di Gainesville Florida Amerika Serikat pimpinan Terry Jones dengan dalih peringatan serangan teroris 11 September 2001. Lalu ada perobekan beberapa lembar Alquran oleh aktivis dalam unjuk rasa di Gedung Putih, Amerika Serikat September 2010. Kejadian berdampak besar lain adalah publikasi film *the Innocence of Muslims* di situs YouTube pada September 2012 lalu, disusul kemudian oleh

⁴⁴ Baiq Wardhani, *Thailand Selatan, Sukses Diplomasi Indonesia*. Artikel di harian Jawa Pos 24 September 2008

⁴⁵NU Online, 26 Juli 2012 berjudul "PBNU Minta Pemerintah Dukung Muslim Rohingya," atau Lihat juga dalam NU online 29 Juli 2012, "PBNU Desak Presiden SBY Bantu Etnis Rohingya,"

⁴⁶ Banyak sekali artikel yang mengupas hal ini.

publikasi kartun Nabi Muhammad oleh majalah mingguan Prancis bernama *Charlie Hebdo* (21/9/2012).

Terhadap berbagai tindakan yang dinilai sebagai penghinaan terhadap Islam tersebut, respon global bermunculan.⁴⁷ Respon tersebut mulai dari pengunduran diri pejabat, artikulasi berbagai tuntutan, hingga ekspresi kemarahan yang berujung pada tindakan kekerasan. Tidak jarang demonstrasi dan protes yang muncul kemudian pecah menjadi aksi kekerasan. Kantor perwakilan negara asing terkait biasanya menjadi sasaran protes. Tindak kekerasan yang fenomenal misalnya terjadi di Libya ketika demonstrasi besar-besaran berujung pada pembunuhan terhadap Duta Besar AS di Benghazi, Chris Stevens. Negara-negara yang dikaitkan dengan sumber penghinaan juga terkena dampak. Mereka membuat pernyataan resmi bahwa penghinaan itu tidak mencerminkan sikap resmi negara, hingga menutup kantor perwakilannya karena alasan keamanan.

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Beragam respon bermunculan mulai dari ungkapan keperihatinan, pengecaman, hingga ekspresi kemarahan. Hal itu bisa dimaklumi karena meminjam pemikiran Arnold Wolfers dalam buku *The Globalization of World Politics*, penghujatan agama mencerminkan ancaman terhadap nilai-nilai sehingga menimbulkan ketakutan bahwa nilai-nilai tersebut akan diserang.⁴⁸ Ini sejalan dengan konsep keamanan sosial sebagai bagian dari keamanan manusia.

Sasaran utama respon tersebut biasanya adalah pemerintah Indonesia untuk segera bersikap dan kantor kedutaan besar negara bersangkutan. Namun dijumpai juga aksi yang menysasar obyek lain. Demo Film *Innocence of Muslims* yang dilakukan Keluarga Besar Mahasiswa Muhammadiyah Kota Kendari, misalnya, berdampak pada penyegalan terhadap restoran cepat saji, Kentucky Fried Chicken (KFC)

⁴⁷Dalam kasus Karikatur nabi Muhammad respon global mulai muncul ketika OKI mengungkapkan penentangannya. Organisasi Konferensi Islam dan Liga Arab meminta agar PBB menjatuhkan sanksi internasional terhadap Denmark. Sementara itu, produk dari Denmark diboikot oleh konsumen di Arab Saudi, Kuwait dan negara Arab lain. Selain itu ada protes besar-besaran oleh kaum Muslim di Indonesia, Malaysia, Pakistan, negara Arab dan negara lain yang mempunyai populasi Muslim, hampir semuanya menggunakan kekerasan. Pada tanggal 4 Februari, Kedubes Denmark dan Norwegia di Suriah dibakar, akan tetapi tidak ada korban jiwa. Sehari kemudian pada tanggal 5 Februari Kedubes Denmark di Beirut, Lebanon juga dibakar oleh amukan massa. Akibat kejadian ini, Menteri Dalam Negeri Lebanon, Hassan al-Sabaa mengundurkan diri. Dua hari kemudian, pada 7 Februari, Iran resmi memutuskan hubungan dagang dengan Denmark. Dalam kasus Film *Fitna* 2008, Sekjen PBB Ban Ki Moon mengutuk penayangan film ini. Pemerintah Iran memanggil duta besar Belanda untuk memprotes penayangan film tersebut. Begitu pula dengan Malaysia. Bahkan, mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad, menyerukan kepada seluruh ummat Islam untuk memboikot semua produk Belanda. Sedangkan pemerintah Indonesia dengan tegas mengecam dan mencekal Geert Wilders apabila Ia hendak berkunjung ke Indonesia.

⁴⁸ John Baylis dan Steve Smith, *The Globalization of World Politics* (Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 191.

Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (25/9). Akibat penyegelan itu, KFC pun mengakui telah merugi sekira Rp 30 juta.⁴⁹

Aktor dibalik berbagai respon tersebut beragam mulai aktivis dan anggota organisasi keagamaan, masyarakat kampus, anggota parlemen dan petinggi partai politik, hingga pejabat negara. Namun respon yang muncul tidak lah homogen. Ada kesamaan pandangan dalam hal menyesalkan kemunculan penghinaan, namun dalam tataran aksi berbeda- beda. Organisasi seperti Front pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) misalnya lebih gagap gempita dalam mengartikulasikan tuntutananya.

Berbeda dengan organisasi keagamaan yang lain, NU lebih terlihat tenang tidak reaktif. Sikap Nahdatul Ulama baru terlihat dalam Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdatul Ulama di Pondok Pesantren Ma'had Tarbiyatul Muhtadi'in Kempek, Cirebon, Jawa Barat pada 15-17 September 2012 dengan menghasilkan sejumlah rekomendasi. Nahdatul Ulama mengeluarkan dua rekomendasi terkait hal ini yaitu, pertama, agar lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan OKI membuat konvensi yang mewajibkan semua orang untuk tidak melakukan tindakan yang melecehkan dan atau menodai simbol – simbol yang dihormati agama. Rekomendasi kedua ditujukan kepada umat Islam agar tidak mudah diprovokasi untuk melakukan tindakan yang tidak terkendali dan destruktif oleh segala bentuk serangan seperti yang dilakukan pembuat film *Innocent of Muslims*.⁵⁰ Sikap ini tampak terakomodir dengan upaya Presiden SBY dalam forum Sidang Umum PBB tahun 2012 yang menyuarakan perlunya protokol antipenistaan terhadap agama dan kepercayaan.

Upaya lain yang terlihat adalah pemberian beasiswa PBNU kepada 23 putri asal Afghanistan untuk mengikuti kuliah di Indonesia. Kalau biasanya banyak pelajar Indonesia mencari beasiswa ke luar negeri, hal ini sebaliknya, kita memberikan beasiswa bagi mahasiswa asing. Mereka ditempatkan di Universitas Wahid Hasyim Semarang sembari mengikuti pendidikan agama di pesantren mahasiswa. Dalam sambutan di acara serah terima mahasiswa, baik Wakil Ketua Umum PBNU dan maupun Ketua Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) NU menyampakan harapan dan tujuan pemberian beasiswa tersebut. Selain kesempatan mengecap pendidikan tinggi, hal ini diharapkan bisa menyebarkan pemahaman keagamaan moderat yang bisa disemaikan oleh para mahasiswi nantinya ketika kembali ke Afghanistan.

⁴⁹ <http://www.jpnn.com/read/2012/09/25/140911/Demo-Film-Innocence-of-Muslims,-KFC-Kendari-Merugi-Rp-30-Juta->

⁵⁰ <http://dpp.pkb.or.id/berikut-empat-rekomendasi-munas-konbes-nu>

Langkah lainnya dalam konteks globalisasi Islam *rahmatan lil alamin* adalah pembukaan kantor cabang istimewa NU di berbagai negara baik Timur Tengah (Mesir, Suriah, Sudan, Kuwait, Turki) maupun Barat (Inggris, Amerika dan Kanada, Australia, Jepang, Belanda, Jerman, Turki) dan Asia (Malaysia, Taiwan). Keberadaan mereka bukan semata karena ada orang NU di luar negeri, namun juga karena keinginan mempraktekkan dan menunjukkan Islam ala NU. Bahkan sebagian secara tegas dimaksudkan sebagai upaya untuk menjembatani peradaban Islam-Barat.⁵¹

Hal ini penting misalnya kalau kita cermati dari pandangan Bassam Tibi misalnya. Meski menolak tesis *clash of civilization* Huntington, ia berhasil menunjukkan konflik yang meningkat dan ketidaksesuaian antara gerakan Islamis dengan demokrasi Eropa.⁵² Akibatnya, kesalahpahaman antara kedua pihak terus berkelanjutan. Selain itu, perang global melawan terorisme juga meningkatkan fokus perhatian terhadap Islam dan pertanyaan-pertanyaan politis tentang isu asimilasi, migrasi, integrasi, dan pengungsi.⁵³ Dalam konteks seperti itu maka membuka dialog dan membangun jembatan antar peradaban menjadi teramat penting. Beberapa studi mencatat penggambaran Barat terhadap Islam yang mengerikan antara lain keterbelakangan, kekerasan dan teror, antidemokrasi, dan diskriminasi terhadap perempuan. Berbagai kasus penghinaan agama selain muncul akibat perilaku kekerasan, teror, dan antidemokrasi segelintir muslim di satu sisi, juga disebabkan pandangan keliru terhadap Islam di satu lain. Pembukaan cabang istimewa juga menjadi bagian dari diplomasi yang meminjam pandangan Hassan Wirajuda berupaya memenangkan hati dan pikiran semua pihak di luar negeri agar dapat mengurangi kesalahan persepsi dalam hubungan internasional.⁵⁴

Ringkasan Upaya Humanitarian Diplomacy oleh NU

Jenis Konflik	Contoh Kasus	Strategi NU
Konflik sektarian intra-state dan intra-	Sunni-Syiah di Irak, Libanon, Suriah	<i>Shuttle diplomacy</i> menemui para pihak, berupaya menjadi juru damai dalam merekonsiliasikan berbagai

⁵¹ Lihat beberapa penjelasan alasan pembukaan kantor cabang istimewa NU tersebut misalnya di web site pcnu Amerika Utara dan Kanada atau Jerman.

⁵² Lihat Bassam Tibi, *Political Islam, World Politics and Europe: Democratic Peace and Euro-Islam versus Global Jihad* (London: Routledge, 2008).

⁵³ Lihat misalnya *Islam, Islamic Grouping, and the West* dalam Kurt R. Spillmann, Andreas Wenger, and Michel Hess (Eds.), *Setting the 21st Century Security Agenda: Proceedings of the 5th International Security Forum* (Bern: Peter Lang, 2003), h. 83-86.

⁵⁴ Hasan Wirajuda. 2006. *Membangun Citra Indonesia yang Demokratis, Moderat, dan Progresif: Soft power dan Asset Politik Luar Negeri*. Pidato Menteri Luar Negeri RI.

islam		spektrum politik dan mazhab di Timur Tengah
Konflik intra-state (non-international conflict)	Thailand Selatan, Myanmar	<i>Shuttle diplomacy</i> menemui para pihak dan mendorong perundingan dengan pendekatan agama
Konflik intra-state bernuansa agama lain	Penculikan orang asing	Mengupayakan pembebasan dengan pendekatan tokoh agama
Konflik internasional Islam - Barat dan Islam vs agama lain	Pelecehan agama vs kebebasan berekspresi	Berupaya menjembatani jarak antara dunia Islam dan Barat, mencari <i>kalimatun sawa</i> (titik temu), menjalin dialog, kampanye <i>islam rahmatan lil 'alamin</i> , mendorong pendekatan hukum dan kelembagaan

Catatan

Upaya- upaya yang telah dilakukan sebagaimana paparan di atas adalah bagian dari *faith based diplomacy*. Diplomasi berbasis keyakinan ini merupakan bentuk dari diplomasi multi jalur yang berupaya mengintegrasikan keyakinan agama dengan upaya penciptaan perdamaian internasional.⁵⁵ Sebagai bagian dari *multitrack diplomacy*, bersama diplomasi jalur pertama oleh pemerintah, diplomasi jalur kedua ini membentuk yang turut berkontribusi dalam menciptakan serta membangun perdamaian dunia.⁵⁶ Tujuan dari beberapa diplomasi ini adalah menciptakan serta membangun perdamaian dunia, di antaranya dengan mengurangi (menyelesaikan) konflik serta ketegangan dan kesalahpahaman antar kelompok atau bangsa.

Dari paparan sebelumnya jelas terlihat prinsip dan motivasi yang menjadi latar belakangnya. Semuanya sejalan dengan karakter diplomasi berbasis keyakinan

⁵⁵ Douglas Johnston, *Faith-Based Diplomacy: Trumping Realpolitik* (London: Oxford University Press, 2003)

⁵⁶ Louis Diamond and Ambassador John McDonald, *Multitrack Diplomacy: A System Approach to Peace* (Kumarian Press, 1996). Keragaman kegiatan di dalam *Multi-Track Diplomacy* ini terdiri atas sembilan jalur, yaitu (1) *Government, or Peacemaking through Diplomacy*; (2) *Nongovernment/Professional, or Peacemaking through Conflict Resolution*; (3) *Business, or Peacemaking through Commerce*; (4) *Private Citizen, or Peacemaking through Personal Involvement*; (5) *Research, Training, and Education, or Peacemaking through Learning*; (6) *Activism, or Peacemaking through Advocacy*; (7) *Religion, or Peacemaking through Faith in Action*; (8) *Funding, or Peacemaking through Providing Resources*; (9) *Communications and Media, or Peacemaking through Information*.

ini baik dari sisi *dependency on spiritual principles and resources, spiritual authority, pluralistic heart, a transcendent approach*, maupun *a religious motivation*.⁵⁷

Motivasi untuk menjadi *reconcilers* dan *peacemakers* pada dasarnya berakar dari panggilan keagamaan yang dalam.⁵⁸ Dalam kasus pendamai muslim, hal itu berakar dari ajaran Quran bahwa esensi ajaran Ibrahim bukanlah jihad atau perang suci tetapi perdamaian, keadilan sosial, dan rekonsiliasi. Dalam konteks NU, hal itu dirumuskan dalam misi besar yang disandang oleh semua muslim yaitu membawa islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Surat al-Anbiya' ayat 107 (*Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam*) menjadi keyakinan yang mendorong manifestasi dalam aksi kemanusiaan nyata karena pemahaman bahwa kalau bukan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, atau kalau bukan untuk kesempurnaan akhlak seakan akan Tuhan tidak mengutus pemimpin umat Islam, Muhammad SAW.⁵⁹

Hakikatnya, hal-hal tersebut sejalan dengan prinsip *humanity*. Prinsip kemanusiaan ini merupakan komitmen paling dasar dari aksi kemanusiaan yang dilakukan para aktor dalam aksi kemanusiaan.⁶⁰ Dalam perspektif NU hal itu adalah manifestasi dari pengamalan agama sesuai prinsip persaudaraan manusia (*ukhuwwah basyariyyah*) yaitu persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Di sini sebenarnya kita menemukan juga titik temu pengagungan nilai kemanusiaan antara Barat dan Islam. Titik temu itu misalnya juga bisa kita jumpai dalam kesesuaian antara Islam dengan hukum humaniter internasional.⁶¹

Selain itu kita juga bisa menemukan hal menarik, bahwa strategi yang dilakukan NU merupakan kombinasi antara undangan eksternal dan inisiatif internal. Undangan ini menunjukkan modalitas yang kuat baik dari sisi prinsip, kepercayaan, maupun kedekatan dengan pihak bertikai. Undangan terhadap PBNU dari

⁵⁷Lihat http://www.ctksb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=106:the-nature-of-faith-based-diplomacy-&catid=13:journal-articles-a-occasional-papers&Itemid=31. Diakses pada 27 Mei 2013 jam 13.45 WIB.

⁵⁸ Lihat http://www.ctksb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=106:the-nature-of-faith-based-diplomacy-&catid=13:journal-articles-a-occasional-papers&Itemid=31 diakses 16 Mei 2013 jam 16.00 WIB.

⁵⁹ Baca paparan menarik Haidar Baqir berjudul Mempertegas Humanisme Islam yang merupakan pengantar buku Ameer Zemmali (ed.), *Islam dan hukum Humaniter Internasional* (Jakarta: Mizan dan ICRC, 2012)

⁶⁰ Michael Bannet and Weiss, Thomas (ed.), *Humanitarian in Question: Politics, Power, Ethics* (New York: Cornell University Press, 2008), h. 12.

⁶¹ Baca misalnya karya Abdul Ghani Abdul Hamid Mahmud, *Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam* (Jakarta: ICRC Delegasi Regional Indonesia, 2008) atau Zayyid bin Abdel Karim al Zayyid, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional dan Islam* (Jakarta: ICRC Delegasi Regional Indonesia, 2008)

pemerintah Thailand, Korea Selatan, dan Suriah misalnya didasari pandangan mereka yang menganggap NU sebagai kelompok Islam yang moderat. Kultur masyarakat NU juga dinilai sama dengan budaya masyarakat Islam di Thailand Selatan sehingga mempermudah pendekatan. Dalam kasus Suriah, keterkaitan pandangan Sunni serta jaringan ulama yang sudah lama terbangun menjadi modalitas yang juga dinilai penting.

Selain dorongan agama, mengapa mereka berpartisipasi? Secara teoritis, diplomasi mereka dilakukan karena jalur diplomasi politik pemerintah sering kali menemui banyak hambatan.⁶² Beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab sepenuhnya dengan diplomasi jalur pertama antara lain bagaimana menjembatani keretakan hubungan Islam dan Barat atau bagaimana *counterinsurgency* dan *conterterorisme* bisa dijalankan tanpa mengganggu hubungan dengan dunia Islam. Para aktor bukan negara melihat bahwa pemerintah yang terlibat dalam penanganan isu dan proses, atau tidak mampu membuat kemajuan.

Langkah yang ditempuh juga khas. Para pelaku diplomasi jalur kedua berusaha untuk tukar menukar informasi, menyiapkan opini publik untuk kompromi, serta membangun strategi untuk resolusi konflik.⁶³ Hal itu didasari kenyataan bahwa pada ranah yang lebih luas, diplomasi adalah proses interaktif antarpihak yang meliputi upaya membangun hubungan, komunikasi informasi, negosiasi, dan pengiriman sinyal-sinyal.

D. Penutup

Partisipasi diplomasi kelompok privat seperti organisasi keagamaan semakin nyata terlihat. Berbagai diplomasi *private* yang telah dilakukan NU pada hakikatnya menyiratkan banyak hal. **Pertama**, ada dorongan ajaran agama sehingga justru ada kewajiban moral untuk melaksanakannya. Dalam konteks NU, hal itu dirumuskan dalam misi besar yang disandang oleh semua muslim yaitu membawa islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Misi itu bukan mengarahkan pada konflik tetapi justru pada perdamaian, keadilan sosial, dan rekonsiliasi.

Kedua, misi itu diturunkan ke dalam beberapa prinsip operasional dalam relasi sosial seperti toleransi (*tasamuh*), moderat (*tawasut*), adil dan konsistensi (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazun*) serta musyawarah. **Ketiga**, diplomasi kemanusiaan sejalan dengan konsep persaudaraan sesama muslim (*ukhuwah*

⁶²Lihat misalnya artikel Jeff Haynes on February 10, 2013 berjudul *Twenty Years after Huntington's Clash of Civilization* dalam <http://www.e-ir.info/2013/02/10/twenty-years-after-huntingtons-clash-of-civilisations/>.

⁶³Conway Henderon, *Op. Cit.*, halaman 227.

islamiyah), sesama anak bangsa (ukhuwah wathaniyah), dan sesama umat manusia (ukhuwah basyariyah). **Keempat**, ia juga sejalan dengan maksud ajaran agama *hifdzud din* (memelihara agama), *hifdzul aql* (memelihara kebebasan berfikir), *hifdzul mal* (memelihara harta benda), *hifdzun nafs* (memelihara hak hidup), dan *hifdzun nasb* (memelihara hak untuk mengembangkan keturunan).

Pada tatarn praktek, sejumlah diplomasi yang telah dilaksanakan banyak terkait dengan upaya mengurai konflik baik intra-agama islam (antar sunni- syiah), konflik non-internasional (antara komunitas muslim dengan pemerintah negara yang ditempati), hingga konflik internasional (seperti ketegangan Islam- Barat). Strategi yang dijalankan antara lain dengan *shuttle diplomacy* secara bergiliran dan berturut-turut menemui para pihak bertikai, pendekatan ke tokoh agama dengan modalitas/ asset kedekatan hubungan dan kepercayaan yang dimiliki, mengupayakan dialog, mendorong pendekatan hukum dan kelembagaan sebagai penyelesaian konflik, hingga upaya mengkampanyekan wajah *Islam rahmatan lil alamin*. Hal-hal itu dilakukan sesuai dengan porsi kewenangan dan kekuatan yang dimiliki sekaligus melihat karakter akar konfliknya.

Secara umum kontribusinya dalam konteks keamanan dan perdamaian internasional tidak bisa dianggap sebelah mata. Diplomasi oleh negara hampir pasti akan sulit menembus ruang- ruang privat pemeluk dan pimpinan agama termasuk yang tengah bertikai. Pendekatan tokoh agama lah yang kemudian sering kali bisa membantu menguraikannya. Apa yang telah diupayakan memainkan peranan yang signifikan dalam mengurai permasalahan di dunia Muslim dan internasional termasuk dalam menjembatani jarak Islam- Barat.

Catatan akhir yang perlu ditekankan adalah bagaimana keberlanjutan peran itu bisa terjaga. Konflik berbasis identitas tampaknya masih akan terus mewarnai politik internasional di satu sisi, di sisi lain ada sumber daya yang terbatas serta perhatian yang juga harus difokuskan pada pembenahan kekuatan ekonomi dan pendidikan internal NU. Namun dengan motivasi yang berakar dari inspirasi agama, tampaknya hal itu tidak terlalu perlu dirisaukan. Hanya saja memang diperlukan sinergi dengan negara dan NGO yang lain.

Daftar Pustaka

Abdul Ghani Abdul Hamid Mahmud, *Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam*, Jakarta: ICRC Delegasi Regional Indonesia, 2008

Achmad Siddiq, KH, *Khitthah Nahdliyyah*, Surabaya: Khalista, 2007

- Appleby, R. Scott, *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation*, Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2000
- Ayu Sutarto, *Menjadi NU, Menjadi Indonesia: Pemikiran KH Abdul Muchith Muzadi* Surabaya: Khalista, 2007
- Ali Anwar., *Avonturisme NU: Menjajaki Akar Konflik-Kepentingan Politik Kaum Nahdhiyyin*, Bandung: Humaniora, 2004
- Anak Agung Banyu Perwita dan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005
- A.Gaffar Karim, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 1995
- Bahrul 'Ulum, "Bodohnya NU" Apa "NU Dibodohi"?: Jejak Langkah NU Era Reformasi: Menguji Khittah Meneropong Paradigma Politik , Yogyakarta: Ar-Ruzz Press Bekerja sama dengan PW IPNU Jawa Tengah, 2002
- Bannet, Michael and Weiss, Thomas (ed.), *Humanitarian in Question: Politics, Power, Ethics* New York: Cornell University Press, 2008
- Baylis, John dan Steve Smith, *The Globalization of World Politics*, Oxford: Oxford University Press, 1991
- Diamond, Louis. and Ambassador John McDonald, *Multitrack Diplomacy: A System Approach to Peace*, Kumarian Press, 1996
- Fealy, Greg, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, Yogyakarta: LkiS, 1998
- Feillard, Andree, *NU vis a vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta: LkiS, 1999
- Gray, Colin S, *War, Peace and International Relations : An Introduction to Strategic History*, New York: Routledge, 2007

- Hasan Wirajuda, *Membangun Citra Indonesia yang Demokratis, Moderat, dan Progresif: Soft power dan Asset Politik Luar Negeri*. Pidato Menteri Luar Negeri RI, 2006
- Hasyim Muzadi, *Islam Rahmatan Lil'alamin Menuju Keadilan dan Perdamaian Dunia (Perspektif Nahdlatul Ulama)* dalam pidato ilmiah penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dalam 'Peradaban Islam dari IAIN Sunan Ampel Surabaya 2 Desember 2006.
- Hatzopoulos, Pavlos and Fabio Petito, *Religion in International Relations: The Return from Exile* yang diedit oleh New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2003
- Henderon, Conway, *International Relations: Conflict and Cooperation at the Turn of 21st Century* (Singapore: McGraw Hill), 1998
- Hough, Peter, *Understanding Global Security. 2nd Edition*, London: Routledge, 2008
- Jan, Melissen, *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*, New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2005
- Jackson, Robert & Georg Sorenson, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Kraffes, Jamal, *The Influence of the Muslim Religion in Humanitarian Aid*. International Review of the Red Cross Volume 87 Number 858 June 2005
- Kegley, Charles W. and Eugene R. Witkopf, *Global Politics: Trend and Transformation*. 6th Edition, New York: St Martin Press, 1997
- Laode Ida, *Anatomi Konflik: NU, Elite Islam dan Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Mansbach, Richard W. dan Kirsten L. Raffery, *Pengantar Politik Global*, Bandung: Nusamedia, 2012
- Masyhudi Muchtar, *Aswaja An-Nahdliyah, Ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah yang Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama*, Surabaya: Khalista, 2007

- M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998
- M. Imdadun Rahmat (ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, Jakarta: Lakpesdam, 2002
- M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996
- Noor Shodiq Iskandar dan Hasan Abadi (eds.), *Konfigurasi Nalar Nahdlatul'Ulama* (Malang: Pustaka Iqtishod, 2010
- Salahuddin Wahid, *Menggagas Peran Politik NU*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002
- Spillmann, Kurt R., Andreas Wenger, and Michel Hess (Eds.), *Setting the 21st Century Security Agenda: Proceedings of the 5th International Security Forum*, Bern: Peter Lang, 2003
- Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah*, Surabaya: Khalista, 2007
- Tibi, Bassam, *Political Islam, World Politics and Europe: Democratic Peace and Euro-islam versus Global Jihad*, London: Routledge, 2008
- Thoyyib dan Endang Turmudzi (eds.). *Islam Ahlussunnah Waljamaah: Sejarah, Pemikiran dan Dinamika Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Pustaka Maarif NU
- Van Bruinessen, Martin, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LkiS, 1994
- Zayyid bin Abdel Karim al Zayyid, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional dan Islam*, Jakarta: ICRC Delegasi Regional Indonesia, 2008
- Zemmali, Ameur. (ed) *Islam dan hukum Humaniter Internasional*, Jakarta: Mizan dan ICRC, 2012

Internet dan Koran

- As'ad Said Ali, *Islam Rahmatan Lil 'Alamin: NU dan Peran Kenegaraannya* (Pidato di Istanbul) bisa dilihat dalam <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,6-id,35031-lang,id-c,taushiyah-t,Islam+Rahmatan+Lil++Isquo+Alamin++NU+dan+Peran+Kenegaraannya-.phpx>
- Haynes, Jeff on February 10, 2013 berjudul *Twenty Years after Huntington's Clash of Civilization* dalam <http://www.e-ir.info/2013/02/10/twenty-years-after-huntingtons-clash-of-civilisations/>.
- Huber, Nathan. 27 March 2009, *Religion and International Peacemaking* <http://www.nathanhuber.com/essays/religion-and-international-peacemaking>.
- Hunter, Shireen T. <http://www.e-ir.info/2010/04/07/religion-and-international-affairs-from-neglect-to-over-emphasis/> Diakses 14 Mei 2013 jam 16.36 WIB.
- McKay, Al. *Religion, Sacred Value and Conflict* artikel diposting June 14, 2012 di <http://www.e-ir.info/2012/06/14/religion-sacred-values-and-conflict/>.
- Muhyidin Abdusshomad dalam <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,16551-lang,id-c,syariah-t,Karakter+Tawassuth++Tawazun++I+tidal++dan+Tasamuh+dalam+Aswaja-.phpx>
- Toft, Monica Duffy. *Religion Matters in International Relations* dalam http://www.huffingtonpost.com/monica-duffy-toft/turning-religious-and-mul_b_481237.html
- Werkner, Dr. Ines- Jacqueline dalam *the Caucasian Review on International Affairs* Vol. 4 Summer 2010: 273-247).
- Nu online bagian dinamika <http://www.nu.or.id/a,public-m,static-s,detail-lang,id-ids,1-id,10-t,dinamika-.phpx> atau di bagian sejarah <http://www.nu.or.id/a,public-m,static-s,detail-lang,id-ids,1-id,6-t,sejarah-.phpx>
- NU Berpotensi Mainkan Diplomasi Publik di di Timur Tengah dalam http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=1260&type=15
- NU Online, 26 Juli 2012 berjudul "PBNU Minta Pemerintah Dukung Muslim Rohingya," atau Lihat juga dalam NU online 29 Juli 2012, "PBNU Desak Presiden SBY Bantu Etnis Rohingya,"
- Baiq Wardhani, *Thailand Selatan, Sukses Diplomasi Indonesia*. Artikel di harian Jawa Pos 24 September 2008
Republika, 07 Desember 2011

[http://www.jpnn.com/read/2012/09/25/140911/Demo-Film-Innocence-of-Muslims,-KFC-Kendari-Merugi-Rp-30-Juta-](http://www.jpnn.com/read/2012/09/25/140911/Demo-Film-Innocence-of-Muslims,-KFC-Kendari-Merugi-Rp-30-Juta)

<http://dpp.pkb.or.id/berikut-empat-rekomendasi-munas-konbes-nu>

http://www.ctksb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=106:the-nature-of-faith-based-diplomacy-&catid=13:journal-articles-a-occasional-papers&Itemid=31. Diakses pada 27 Mei 2013 jam 13.45 WIB.

<http://www.ifrc.org/en/get-involved/learning/opportunities/humanitarian-diplomacy/>